

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan pengukuran penghasilan pada semua wilayah diperoleh bersumber dari keseluruhan tambahan barang serta jasa dengan jangka waktunya yaitu satu tahun yang bersumber dari kegiatan perekonomian. Besarnya PDRB disebabkan karena adanya faktor sumberdaya manusia, sumberdaya alam, serta prioritas kebijakan pembangunan. Nilai PDRB yang semakin tinggi pada suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki potensi sumber pendapatan yang semakin besar (Wulaningrum et al., 2022). Fenomena umum dalam perekonomian adalah bahwa asal faktor-faktor produksi (seperti modal, tenaga kerja, dan bahan baku) sering kali tidak diperhatikan. Suatu daerah bisa menggunakan faktor produksi yang berasal dari luar wilayahnya atau bahkan dari luar negeri. Sebaliknya, daerah yang memiliki faktor produksi berlebih juga bisa mengirimnya ke daerah lain atau ke luar negeri. Kondisi ini menciptakan disparitas pendapatan antar daerah, yang selanjutnya berdampak pada perbedaan antara produk domestik dan produk regional mereka (BPS, 2022).

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, umumnya menghadapi masalah serius berupa ketimpangan pendapatan atau kesenjangan ekonomi. Fenomena ini merujuk pada distribusi pendapatan yang tidak merata di suatu wilayah, yang jauh dari kondisi ideal. Ketimpangan ini terlihat dari adanya perbedaan signifikan dalam

pendapatan antar kelompok masyarakat, mulai dari mereka yang berpenghasilan tinggi, menengah, hingga rendah. Selain itu, masalah ini juga mencakup ketidakmerataan pembangunan ekonomi antar daerah. Jika ketimpangan ini terlalu tinggi, dampaknya akan sangat buruk bagi kehidupan sosial dan ekonomi, bahkan berpotensi memicu konflik (Ardyansyah et al., 2022). Setiap daerah menghadapi tingkat ketimpangan yang berbeda-beda, dan kondisi ini sering kali memicu kemiskinan serta kesenjangan pendapatan untuk mencegah pelebaran ketimpangan yang ada, penanganan segera sangat diperlukan..

Provinsi Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota, dan setiap wilayahnya memiliki karakteristik yang unik. Perbedaan ini berasal dari letak geografis dan keunggulan sumber daya masing-masing daerah, yang kemudian memengaruhi pola pembangunan ekonomi. Akibatnya, terdapat perbedaan dalam pembangunan ekonomi dan ketimpangan, baik dalam proses pembangunan itu sendiri maupun pada hasil akhirnya, termasuk ketimpangan kegiatan pembangunan dan ketimpangan pendapatan.

Pengukuran tinggi rendahnya suatu ketimpangan yang terjadi pada wilayah daerah dapat digunakan suatu indeks gini. Pengukuran tersebut dapat menjelaskan hubungan antara penduduk berpendapatan tinggi dengan penduduk lainnya. Dimana indeks gini memiliki nilai diantara 0 sampai 1. Nilai 0 berarti seluruh masyarakat akan memperoleh pendapatan yang terbagi dengan rata. Sedangkan nilai 1 menggambarkan ketidaksetaraan pendapatan dimana pendapatan seluruh distribusi hanya dimiliki seseorang saja (Pangestuty & Prasetyia, 2021). Semakin besarnya nilai indeks gini maka tingkat ketidakmerataan yang terjadi juga semakin tinggi dan jika semakin kecil nilai suatu

indeks gini maka ketidak merataan yang terjadi juga semakin rendah. Untuk melihat perbandingan angka gini ratio provinsi jawa timur tahun 2019-2023 ditunjukkan pada table 1.1.

Tabel 1. 1 Gini Rasio Provinsi Jawa Timur

| KABUPATEN/ KOTA | TAHUN | | | | |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kabupaten Pacitan | 0.398 | 0.351 | 0.337 | 0.338 | 0.352 |
| Kabupaten Ponorogo | 0.346 | 0.38 | 0.369 | 0.336 | 0.341 |
| Kabupaten Trenggalek | 0.372 | 0.379 | 0.335 | 0.331 | 0.336 |
| Kabupaten Tulungagung | 0.304 | 0.336 | 0.327 | 0.342 | 0.328 |
| Kabupaten Blitar | 0.333 | 0.348 | 0.353 | 0.335 | 0.36 |
| Kabupaten Kediri | 0.299 | 0.325 | 0.33 | 0.329 | 0.306 |
| Kabupaten Malang | 0.382 | 0.371 | 0.367 | 0.368 | 0.378 |
| Kabupaten Lumajang | 0.295 | 0.297 | 0.309 | 0.349 | 0.391 |
| Kabupaten Jember | 0.301 | 0.318 | 0.336 | 0.301 | 0.344 |
| Kabupaten Banyuwangi | 0.313 | 0.316 | 0.373 | 0.329 | 0.351 |
| Kabupaten Bondowoso | 0.302 | 0.329 | 0.334 | 0.365 | 0.35 |
| Kabupaten Situbondo | 0.319 | 0.305 | 0.323 | 0.298 | 0.326 |
| Kabupaten Probolinggo | 0.326 | 0.326 | 0.326 | 0.275 | 0.319 |
| Kabupaten Pasuruan | 0.308 | 0.346 | 0.344 | 0.325 | 0.367 |
| Kabupaten Sidoarjo | 0.311 | 0.34 | 0.347 | 0.373 | 0.359 |
| Kabupaten Mojokerto | 0.27 | 0.325 | 0.294 | 0.327 | 0.338 |
| Kabupaten Jombang | 0.331 | 0.334 | 0.332 | 0.31 | 0.339 |
| Kabupaten Nganjuk | 0.421 | 0.335 | 0.308 | 0.301 | 0.324 |
| Kabupaten Madiun | 0.333 | 0.357 | 0.359 | 0.354 | 0.342 |
| Kabupaten Magetan | 0.358 | 0.324 | 0.357 | 0.352 | 0.373 |
| Kabupaten Ngawi | 0.336 | 0.337 | 0.309 | 0.3 | 0.328 |
| Kabupaten Bojonegoro | 0.309 | 0.303 | 0.34 | 0.28 | 0.283 |
| Kabupaten Tuban | 0.298 | 0.337 | 0.345 | 0.345 | 0.338 |
| Kabupaten Lamongan | 0.319 | 0.296 | 0.292 | 0.273 | 0.295 |
| Kabupaten Gresik | 0.282 | 0.299 | 0.313 | 0.363 | 0.33 |
| Kabupaten Bangkalan | 0.314 | 0.322 | 0.303 | 0.306 | 0.299 |
| Kabupaten Sampang | 0.267 | 0.262 | 0.268 | 0.28 | 0.254 |
| Kabupaten Pamekasan | 0.339 | 0.32 | 0.323 | 0.305 | 0.348 |
| Kabupaten Sumenep | 0.305 | 0.256 | 0.294 | 0.266 | 0.287 |
| Kota Kediri | 0.321 | 0.346 | 0.374 | 0.371 | 0.4 |
| Kota Blitar | 0.338 | 0.344 | 0.37 | 0.381 | 0.397 |
| Kota Malang | 0.342 | 0.395 | 0.407 | 0.421 | 0.413 |

| | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kota Probolinggo | 0.269 | 0.311 | 0.299 | 0.322 | 0.347 |
| Kota Pasuruan | 0.306 | 0.301 | 0.35 | 0.36 | 0.378 |
| Kota Mojokerto | 0.309 | 0.355 | 0.334 | 0.381 | 0.353 |
| Kota Madiun | 0.347 | 0.392 | 0.345 | 0.398 | 0.416 |
| Kota Surabaya | 0.406 | 0.344 | 0.351 | 0.388 | 0.423 |
| Kota Batu | 0.318 | 0.333 | 0.312 | 0.308 | 0.33 |
| Jawa Timur | 0.37 | 0.366 | 0.374 | 0.371 | 0.387 |

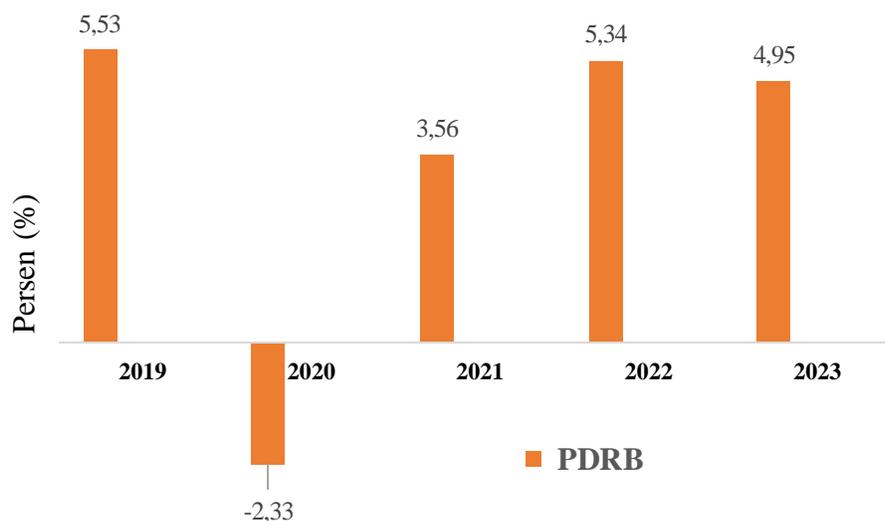
Sumber: BPS Jawa Timur 2024

Dilihat berdasarkan Gambar 1.1 diketahui angka gini rasio provinsi jawa timur dari tahun 2019-2023 dikatakan mengalami kenaikan dan penurunan atau bisa dikatakan adanya ketimpangan rendah di setiap daerahnya. Pada tahun 2019 angka gini rasio sebesar 0,42 yaitu di tempati oleh kabupaten nganjuk, kemudian angka gini rasio mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,39. Selanjutnya pada tahun 2021 angka gini rasio mengalami kenaikan sebesar 0,40, serta mengalami kenaikan kembali di tahun 2022 mencapai angka 0,42. Pada tahun 2023 angka gini rasio tetap stabil sebesar 0,42. Hal ini terjadi karena adanya pengeluaran penduduk pada daerah kabupaten maupun kota berbeda-beda oleh karena itu dapat terjadinya ketimpangan di setiap daerahnya. Pada prakteknya, koefisien Gini untuk negara negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,75, sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata, angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35. Semakin besar nilai koefisien Gini, maka mengindikasikan semakin tidak meratanya distribusi pendapatan, sebaliknya semakin kecil nilai koefisien Gini, mengindikasikan semakin meratanya distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan faktor yang dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Hal ini sering digunakan sebagai alat untuk

menganalisis dan memahami perkembangan ekonomi suatu negara secara keseluruhan (Bhagaskara, 2023). Suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi jika semua sektor perekonomiannya menunjukkan peningkatan. Umumnya, daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi namun menurut Tambunan (2016) pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan penciptaan lapangan kerja bisa memicu ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kemiskinan. Berikut gambar 1.1 yang menjelaskan PDRB Provinsi Jawa Timur :

Gambar 1.1 PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023 (Dalam Persen)



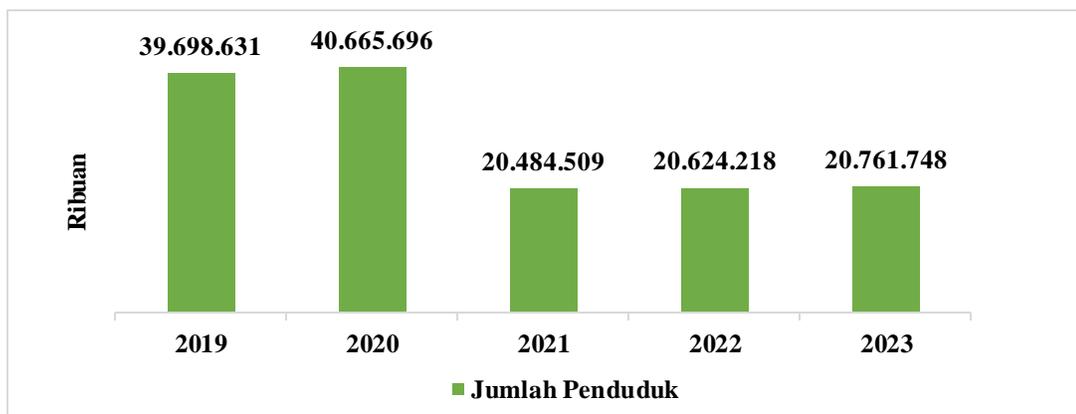
Sumber : Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 1.1 menyajikan data pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dalam bentuk persentase dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, Provinsi Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan PDRB yang kuat sebesar 5.53%, menjadi angka tertinggi dalam periode yang diamati. Namun, kondisi ekonomi mengalami kontraksi signifikan di tahun 2020

dengan pertumbuhan negatif -2.33%, yang kemungkinan besar merupakan dampak dari pandemi global COVID-19. Memasuki tahun 2021, terlihat adanya pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan positif 2.56%. Tren pemulihan berlanjut dan bahkan menguat di tahun 2022, mencapai pertumbuhan 5.34%, mendekati level pra-pandemi. Meskipun sedikit melambat menjadi 4.95% di tahun 2023, pertumbuhan PDRB Jawa Timur tetap menunjukkan kinerja positif yang kuat. Data ini, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (2023), secara keseluruhan menggambarkan ketahanan ekonomi Jawa Timur dalam menghadapi krisis dan kemampuannya untuk pulih serta mempertahankan pertumbuhan yang stabil.

Selain itu, jumlah penduduk juga merupakan faktor penting yang memengaruhi ketimpangan ini. Semakin besar dan cepat pertumbuhan penduduk, semakin besar pula potensi masalah yang akan muncul. Menurut teori (Sukirno, 2015), peningkatan jumlah penduduk yang tak terkendali dapat menjadi pendorong sekaligus penghambat pembangunan ekonomi. Sebagai pendorong, hal ini bisa menambah tenaga kerja dan memperluas pasar barang dan jasa. Namun, jika tidak terkendali, pertumbuhan penduduk juga bisa menjadi penghambat. Jumlah penduduk yang terlalu banyak dapat menurunkan produktivitas dan memicu pengangguran, yang pada akhirnya membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini kemudian berkontribusi pada peningkatan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Affah, 2024). Berikut gambar 1.2 mengenai jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur:

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik (2025)

Gambar 1.2 menyajikan data jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur selama lima tahun. Pada tahun 2019, jumlah penduduk tercatat sebanyak 39.698.631 jiwa, yang kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 40.665.696 jiwa pada tahun 2020. Namun, tren ini tidak berlanjut mulus pada tahun 2021, terjadi sedikit penurunan jumlah penduduk menjadi 39.481.509 jiwa. Setelah penurunan tersebut, populasi Jawa Timur kembali menunjukkan pertumbuhan positif, dengan jumlah penduduk meningkat menjadi 40.621.318 jiwa di tahun 2022 dan terus berlanjut hingga mencapai angka tertinggi dalam periode ini yaitu 40.761.748 jiwa pada tahun 2023. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami fluktuasi minor berupa penurunan di tahun 2021, data ini mengindikasikan bahwa Provinsi Jawa Timur secara umum mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang stabil dan berkelanjutan dari tahun 2019 hingga 2023, dengan populasi yang secara konsisten berada di atas 40 juta jiwa pada tahun-tahun terakhir. Pertambahan populasi dari waktu ke waktu dapat mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Bersama bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan jumlah tenaga kerja pun bertambah, serta peningkatan ini berdampak

pada meningkatnya output suatu daerah. Akibat buruk dari pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan peluang kerja pada tiap wilayah akan mengakibatkan pelambatan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (Asri, 2024).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Istiqamah et al., (2020) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian tersebut sejalan dengan Putri & Hanifa Nurul, (2024) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Berbeda dengan penelitian Helmy et al., (2024) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan penelitian Firdaus & Indira Hasmarini, (2023) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Berbeda dengan penelitian Nasution, (2023) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian tersebut sejalan dengan Raziq & El Hasanah, (2023) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawan et al., (2024) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Berdasarkan penelitian Fitriyani et al., (2019) menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas tentang ketimpangan pendapatan di Indonesia, namun penelitian yang secara spesifik menganalisis pengaruh

pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Tingkat kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian terdahulu hanya fokus pada Tingkat nasional atau regional secara agregat, tanpa melihat heterogenitas antar kabupaten atau kota yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan ketimpangan pendapatan.

Belum adanya penelitian terdahulu yang secara simultan menguji hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur dalam periode 2019-2023. Padahal karakteristik demografis dan potensi ekonomi yang berbeda-beda antar wilayah berperan penting dalam memengaruhi ketimpangan pendapatan. Keunikan pada penelitian ini terletak pada pendekatan wilayah yang lebih mikro (kabupaten atau kota), serta periode kajian yang relative baru dan mencakup masa sebelum dan setelah pandemi Covid-19, yang mana berpotensi menimbulkan dinamika ketimpangan pendapatan yang signifikan. Keterbaruan dalam penelitian ini adalah pada integrasi dua variabel utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk, dengan analisis kuantitatif secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan di tingkat kabupaten/kota dalam lingkup satu provinsi. Penelitian ini juga menggunakan data terbaru hingga tahun 2023, yang belum banyak dimanfaatkan dalam studi-studi sebelumnya.

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memperkaya literatur di bidang ekonomi regional, khususnya mengenai dinamika ketimpangan pendapatan di daerah Provinsi Jawa Timur. Hasilnya dapat menjadi referensi penting bagi akademisi dan

pembuat kebijakan di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya penting untuk memahami dinamika ekonomi dan sosial di Jawa Timur, tetapi juga krusial dalam menyediakan bukti konkret yang dapat memandu upaya pemerintah untuk menciptakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu melakukan penelitian tentang **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi (X1) secara parsial terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provisi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk (X2) secara parsial terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provisi Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi (X1) dan jumlah penduduk (X2) secara simultan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Provisi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk secara parsial terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penulis berharap dapat menambah literatur empiris tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi jawa timur tahun 2019-2023.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai tambahan informasi tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar daerah di provinsi jawa timur tahun 2019-2023.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro.

1.5 Batasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, peneliti memberikan pembatasan permasalahan agar dalam penelitian pembahasan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Pada penelitian ini dibatasi oleh data sekunder yang digunakan periode dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.